



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/01
TGL. PEMBUATAN	:	01 Maret 2018
TGL. REVISI	:	10 Juli 2020
TGL. EFEKTIF	:	10 Juli 2020

Disahkan Oleh,



Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text" value="—"/> <input type="text" value="—"/> <input type="text" value="—"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA*











**MAHKAMAH AGUNG RI  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI  
JAKARTA**  
JL. RADIN INTEN II NO.3 TELP.(021) 86902313  
**J A K A R T A**

Nomor SOP	SOP/AP/01
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	10 Juli 2020
Tanggal Efektif	10 Juli 2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

### SOP PELAYANAN INFORMASI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009	1. S-1 Komunikasi 2. SMA Sederajat
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi	
4	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya	
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	
6	Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	
7	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	
8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	
9	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
10	SK Dirjen No. 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Agama.	
11	Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1	SOP Pelayanan Pengaduan	Peralatan komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan, Formulir Permohonan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan prima dan keterbukaan informasi tidak tercapai	Register Informasi
2	Hari dan Jam Layanan: Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 – 16.30 WIB Hari Jumat Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB	

## PELAYANAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Informasi	PJ	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima Permohonan informasi dan menyediakan formulir permohonan informasi				Formulir Permohonan informasi	5 Menit	Permohonan Informasi dapat dilayani
2	Mengisi Register permohonan informasi				Formulir permohonan, buku register	5 Menit	Tercatat dalam register
3	Mencari informasi yang diperlukan dan meneruskan permohonan informasi ke penanggung jawab (jika tidak perlu izin PPID)				Formulir Permohonan informasi	30 Menit	Tersedianya informasi
4	Mempelajari informasi yang diperlukan				Formulir Permohonan informasi	30 Menit	Diketuinya informasi yang diperlukan
5	Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya				Formulir Permohonan informasi	2 Hari	Terbitnya ijin PPID
6	Menyerahkan informasi yang diminta pemohon				Formulir Permohonan informasi	30 Menit	Diterimanya informasi
<b>Waktu yang Diperlukan : 2 hari 1 jam 40 menit</b>							